

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tinjauan pustaka atau dasar teori yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat, serta mengulas berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Investasi**

Investasi dalam makroekonomi adalah pengeluaran untuk pembelian barang modal baru (seperti mesin, pabrik, peralatan, dan bangunan) yang bertujuan menambah kapasitas produksi barang dan jasa di masa depan. Investasi tidak termasuk pembelian aset keuangan seperti saham atau obligasi, melainkan pada penambahan modal fisik (Mankiw, 2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi meliputi:

- Tingkat bunga
- Ekspektasi keuntungan masa depan
- Kemajuan teknologi
- Kebijakan pemerintah
- Stabilitas ekonomi dan politik

Dalam teori Klasik, investasi dipandang sangat bergantung pada tingkat bunga, jika suku bunga tinggi, investasi cenderung rendah karena biaya pinjaman

mahal, dan sebaliknya. Fungsi investasi dalam pandangan Klasik dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I = f(i)$$

Di mana,

I : investasi

i : tingkat bunga

Semua pendekatan ini berlandaskan pada sisi permintaan (investasi) dan penawaran (tabungan), yang sama-sama dipengaruhi oleh harga (tingkat bunga) untuk mencapai titik keseimbangan.

Keynes memperkenalkan konsep *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) yaitu tingkat pengembalian marginal yang diharapkan dari investasi baru, setelah memperhitungkan seluruh biaya modal yang dikeluarkan (Rao, 1969). Menurut Keynes, investasi tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga, tetapi juga oleh ekspektasi keuntungan masa depan, biaya investasi, dan faktor psikologis para pelaku usaha. Investasi akan dilakukan jika MEC lebih besar dari tingkat bunga, sehingga fungsi investasinya dapat dituliskan sebagai berikut:

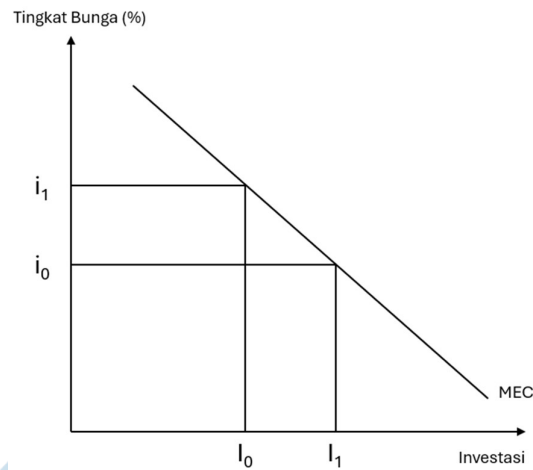
$$e(I) = r$$

Di mana,

e : efisiensi marjinal modal

r : tingkat bunga

I : jumlah investasi agregat dalam barang modal baru



**Gambar 2. 1**  
**Kurva Investasi**

Sumber: Sukirno, 1985:185

Fungsi tersebut mempunyai slope negatif artinya semakin menurun tingkat bunga maka akan semakin besar pengeluaran investasi yang diinginkan atau direncanakan oleh para investor.

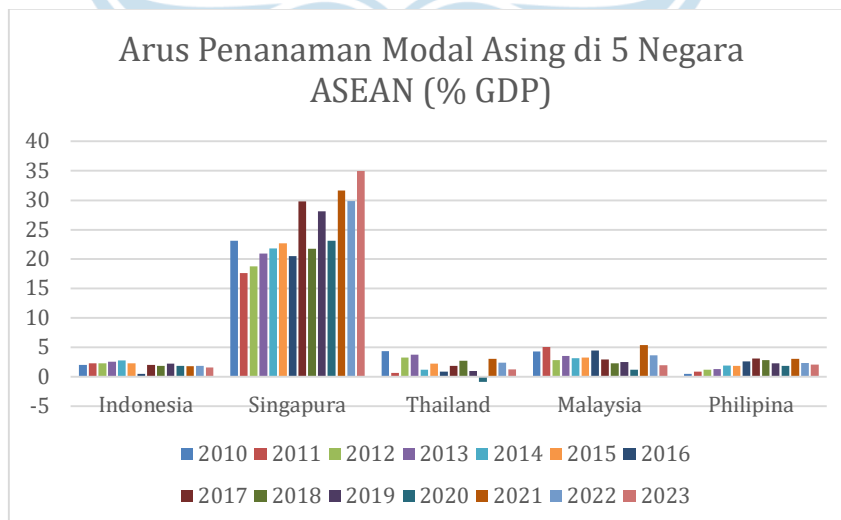
### 2.1.2. Teori Investasi Asing Langsung (FDI)

*International Monetary Fund (2010)* mendefinisikan investasi asing langsung (FDI) sebagai bentuk investasi lintas batas di mana suatu entitas atau individu dari suatu negara melakukan investasi yang berkelanjutan dan signifikan pada perusahaan yang beroperasi di negara lain. Selain itu, investasi dapat dikategorikan sebagai FDI jika investor asing memiliki minimal 10% saham dari perusahaan penerima di negara tujuan, yang mencerminkan kontrol manajerial atau pengaruh jangka panjang terhadap perusahaan tersebut.

Berdasarkan Gambar 2.2, terlihat bahwa arus penanaman modal asing (FDI) sebagai persentase terhadap PDB di lima negara ASEAN menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan selama periode 2010–2023. Singapura secara konsisten

mencatat arus FDI tertinggi, jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya, dengan rasio FDI terhadap PDB yang berkisar antara sekitar 20% hingga lebih dari 30% setiap tahunnya. Sementara itu, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Filipina menunjukkan angka FDI yang relatif rendah, umumnya di bawah 5% dari PDB.

Dominasi Singapura sebagai penerima FDI terbesar di kawasan ini mengindikasikan daya tarik investasi yang sangat tinggi, yang kemungkinan besar didukung oleh infrastruktur yang sangat baik, stabilitas ekonomi, serta kebijakan yang ramah investasi. Sebaliknya, Indonesia dan negara ASEAN lainnya masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing untuk menarik FDI, salah satunya terkait kualitas infrastruktur, stabilitas makroekonomi, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Hal ini memperkuat pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur dan iklim investasi agar Indonesia dapat lebih bersaing dalam menarik investasi asing langsung di kawasan ASEAN.



Sumber: *World Bank*, 2025 diolah.

**Gambar 2.2**  
**Arus Penanaman Modal Asing di 5 Negara ASEAN (2010 - 2023)**

Faktor-faktor yang mempengaruhi FDI dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: faktor lokasi dan faktor kebijakan. Menurut Bagraff. H (2024), variabel penting yang memengaruhi FDI di Indonesia antara lain:

- Kualitas infrastruktur (jalan, listrik, pelabuhan)
- Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro
- Biaya tenaga kerja dan produktivitas
- Stabilitas politik dan hukum
- Ketersediaan bahan baku dan sumber daya

Kualitas infrastruktur memiliki hubungan erat dengan efisiensi operasional perusahaan. Jalan yang baik, jaringan listrik yang stabil, serta layanan publik yang memadai memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

### **2.1.3. Teori OLI (*Ownership, Location, Internalization*)**

Dunning (1977) mengembangkan teori OLI untuk menjelaskan motivasi perusahaan multinasional dalam melakukan investasi langsung ke asing melalui tiga komponen utama: *Ownership*, *Location*, dan *Internalization*. Komponen *Ownership advantages* merujuk pada keunggulan spesifik perusahaan seperti teknologi, merek dagang, atau manajemen, yang tidak dimiliki perusahaan lokal. Sedangkan, *Location advantages* menunjukkan daya tarik spesifik suatu negara sebagai tujuan investasi, seperti biaya tenaga kerja, stabilitas politik, dan kualitas infrastruktur. Terakhir, *Internalization advantages* menggambarkan manfaat yang diperoleh perusahaan dari mengelola operasional di asing secara langsung daripada melalui lisensi atau kemitraan. Penelitian yang dilakukan oleh Adam (2025)

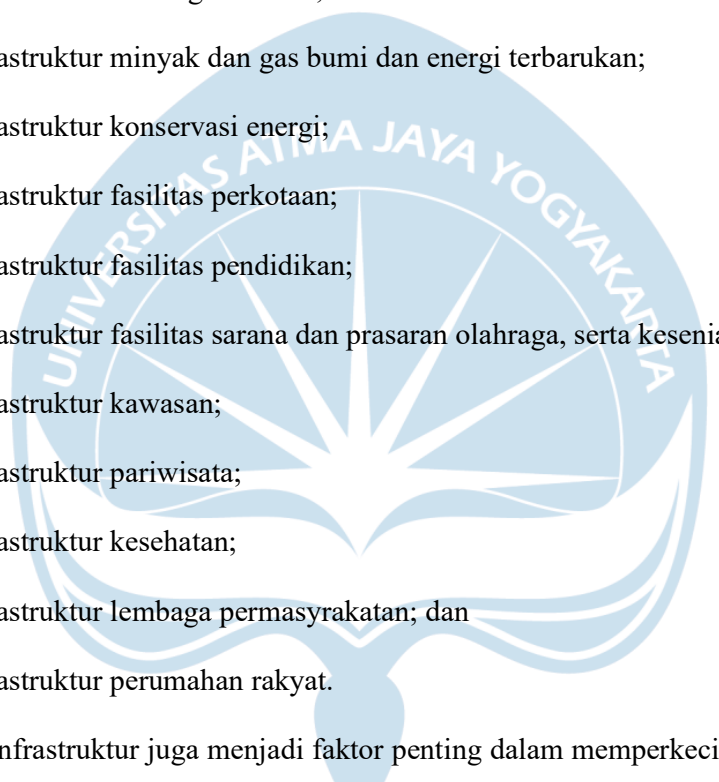
menambahkan bahwa keberadaan regulasi hukum yang mendukung dan kepastian kontrak bisnis di Indonesia memperkuat faktor internalisasi dalam keputusan investasi asing, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka OLI. Ramdhan (2025) menegaskan persebaran penanaman modal asing sangat bergantung pada daya saing antar provinsi, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur industri dan konektivitas logistik.

#### **2.1.4. Infrastruktur**

Infrastruktur secara umum merupakan kumpulan sarana fisik dan sistem pelayanan yang menopang aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Bank Dunia, infrastruktur didefinisikan sebagai sistem penting untuk pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan yang menghubungkan masyarakat dengan peluang ekonomi, memperkuat pasar, serta mendukung pembangunan masa depan yang bersih dan efisien (World Bank, 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk pelayanan publik dan mendukung jaringan struktural dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, terdapat beberapa jenis infrastruktur ekonomi dan sosial:

- 1) Infrastruktur transportasi;
- 2) Infrastruktur jalan;
- 3) Infrastruktur sumber daya air dan irigasi;
- 4) Infrastruktur air minum;

- 
- 5) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat;
  - 6) Infrastruktur sistem pengelolaan limbah setempat;
  - 7) Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan;
  - 8) Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
  - 9) Infrastruktur ketenagalistrikan;
  - 10) Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;
  - 11) Infrastruktur konservasi energi;
  - 12) Infrastruktur fasilitas perkotaan;
  - 13) Infrastruktur fasilitas pendidikan;
  - 14) Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian;
  - 15) Infrastruktur kawasan;
  - 16) Infrastruktur pariwisata;
  - 17) Infrastruktur kesehatan;
  - 18) Infrastruktur lembaga permasyarakatan; dan
  - 19) Infrastruktur perumahan rakyat.

Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam memperkecil ketimpangan antar wilayah. Menurut Kustanto (2020), keterbatasan jaringan infrastruktur di Indonesia menyebabkan tingginya biaya ekonomi, memperlambat pemerataan pembangunan antar daerah.

#### **2.1.3.1. Infrastruktur Jalan**

PP No. 34 Tahun 2006 mendefinisikan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan

tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel

Berdasarkan wewenang pembinaan jalan dikelompokkan menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kotamadya dan Jalan Khusus.

a. Jalan Nasional

Yang termasuk kelompok jalan nasional adalah jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan lain yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional. Penetapan status suatu jalan sebagai jalan nasional dilakukan dengan Keputusan Menteri.

b. Jalan Provinsi

Yang termasuk kelompok jalan provinsi adalah:

- i. Jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kotamadya/
- ii. Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kotamadya.
- iii. Jalan lain yang mempunyai kepentingan strategis terhadap kepentingan provinsi.

c. Jalan Kabupaten

Yang termasuk kelompok jalan kabupaten adalah:

- i. Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
- ii. Jalan lokal primer.
- iii. Jalan sekunder dan jalan lain yang tidak termasuk dalam kelompok jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kotamadya.

d. Jalan Kotamadya

Kelompok jalan Kotamadya adalah jaringan jalan sekunder di dalam kotamadya. Penetapan status suatu ruas jalan arteri sekunder dan atau ruas jalan kolektor sekunder sebagai jalan kotamadya dilakukan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Daerah Kotamadya yang bersangkutan.

e. Jalan Khusus

Kelompok jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi atau badan hukum atau perorangan untuk melayani kepentingan masing-masing.

**2.1.3.2. Infrastruktur Kesehatan**

Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 mendefinisikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan produktif. Menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia memiliki 10.205 puskesmas dan 3.107 rumah

sakit per 2023, dengan peningkatan signifikan dalam cakupan layanan primer dan rujukan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) melalui program transformasi layanan kesehatan nasional (Kemenkes, 2023).

#### **2.1.3.3. Infrastruktur Ketenagalistrikan**

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2024 mendefinisikan infrastruktur ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya (Permen ESDM, 2024).

Infrastruktur Ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan;
- b. pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi tak terbarukan; dan
- c. jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan gardu induk.

Ketersediaan energi listrik yang stabil, luas, dan terjangkau merupakan prasyarat utama bagi kegiatan ekonomi skala besar. Infrastruktur ketenagalistrikan yang kuat tidak hanya mendorong pertumbuhan industri, tapi juga menjadi jaminan efisiensi produksi dan pengurangan risiko gangguan.

#### **2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDRB). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2024).

Untuk menghitung PDRB, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

$$Y = NTB1 + NTB2 + \dots$$

Keterangan,

Y : Pendapatan

NTB : Nilai tambah dari setiap sektor ekonomi

2. Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Adapun persamaan yang digunakan untuk pendekatan pendapatan:

$$Y = W + R + I + P$$

Keterangan,

W : Upah

R : Sewa

I : Investasi

P : Profit

3. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentuk modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Adapun persamaan yang biasa digunakan untuk pendekatan pengeluaran:

$$Y = C + I + G + NX$$

Keterangan,

C : Konsumsi rumah tangga

I : Investasi  
G : Pengeluaran pemerintah  
NX : Net ekspor dan impor

#### **2.1.4.1. Data PDRB**

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
4. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk.
5. Indeks Harga Implisit PDRB menunjukkan perubahan harga pada periode tertentu terhadap periode tahun dasar.
6. Indeks Perkembangan PDRB menunjukkan perubahan hasil proses produksi dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan periode tahun dasar.

## 2.2. Studi Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap penanaman modal asing telah banyak dilakukan di Indonesia, mengingat pentingnya peran kedua faktor tersebut dalam mendorong daya saing wilayah dan menarik investasi global. Tidak hanya di dalam negeri, studi serupa juga dilakukan di negara-negara lain sebagai upaya memahami dinamika FDI di tengah tantangan globalisasi dan keterbatasan sumber daya infrastruktur.

Penelitian oleh Mahyoga *et al.* (2022) membahas bagaimana infrastruktur jalan dan listrik memengaruhi investasi serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Studi ini memakai data sekunder dari BPS Provinsi Bali selama periode 2016 hingga 2022. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan dan dianalisis menggunakan metode data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap investasi dengan sig  $0,568 > 0,05$ , sementara listrik justru memberikan dampak positif dan signifikan dengan sig  $0,014 < 0,05$ . Ketimpangan panjang jalan antar wilayah serta kondisi jalan yang rusak menghambat aktivitas ekonomi. Kualitas jalan menjadi pertimbangan penting bagi investor karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi barang dan jasa. Sementara itu, ketersediaan listrik yang memadai terbukti mendorong investasi, mengingat listrik merupakan komponen vital dalam proses produksi. Tanpa pasokan listrik yang stabil, kapasitas produksi bisa menurun dan berdampak pada turunnya pendapatan.

Penelitian oleh Latif (2021) mengkaji dampak pembangunan infrastruktur terhadap investasi di Kabupaten Gorontalo. Infrastruktur yang dianalisis mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Data diperoleh melalui observasi terhadap data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga jenis infrastruktur tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap investasi, ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 25,848 yang lebih tinggi dari F-tabel sebesar 3,47. Secara keseluruhan, ketiganya memberikan kontribusi positif dan cukup kuat terhadap peningkatan investasi, dengan nilai koefisien korelasi mencapai 0,895. Ini berarti bahwa peningkatan pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pertanian cenderung mendorong naiknya nilai investasi di daerah tersebut.

Studi yang dilakukan oleh Ogunjimi dan Amune (2019) menganalisis peran infrastruktur dalam menarik *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Nigeria selama periode 1981 hingga 2014. Infrastruktur yang menjadi fokus mencakup produksi listrik, penggunaan mesin pertanian, dan jaringan telepon. Hasil uji akar unit menunjukkan bahwa tidak ada variabel dalam studi yang terintegrasi pada orde dua, sehingga metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dapat digunakan. Uji batas (*Bounds Test*) dalam pendekatan ARDL menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antara infrastruktur dan FDI. Namun, estimasi dengan *Error Correction Model* (ECM) mengungkapkan bahwa dalam jangka pendek, ketiga jenis infrastruktur tersebut tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap masuknya FDI. Meski begitu, dalam jangka panjang, produksi listrik terbukti memiliki pengaruh terhadap peningkatan FDI di Nigeria.

Penelitian oleh Dewi dan Triaryati (2015) meneliti bagaimana pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan pajak memengaruhi investasi langsung di Indonesia. Data yang digunakan berupa data time series selama 13 tahun, dari 2001 hingga 2013, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, serta data terkait perpajakan dan investasi langsung. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung, dengan nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi, semakin besar pula minat investor untuk menanamkan modalnya. Pertumbuhan ekonomi yang kuat mencerminkan kapasitas negara dalam mengembangkan sektor ekonominya, sehingga dianggap menarik bagi investor karena potensi untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar.

Penelitian lain yang dilakukan Permana *et al.* (2013) yang mengkaji pengaruh produk domestik bruto, inflasi, infrastruktur, dan risiko politik terhadap investasi langsung asing di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder bersumber dari data Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI), *International Country Risk Guide*, *World Economic Forum-Global Competitiveness*, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Periode data yang digunakan mulai dari tahun 1996 kuartal pertama sampai dengan tahun 2011 kuartal keempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Johansen Multivariate Cointegration Analysis* untuk mengestimasi hubungan jangka panjang, serta *Error Correction Model* (ECM) untuk menganalisis hubungan jangka pendek antar variabel. Hasil uji kointegrasi menunjukkan adanya hubungan

jangka panjang antara variabel independen dan FDI sebagai variabel dependen. Dalam jangka panjang, PDB, infrastruktur, dan inflasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap FDI, sementara risiko politik menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan. Untuk jangka pendek, hanya perubahan inflasi yang terbukti signifikan memengaruhi perubahan FDI.

Kristianto *et al.* (2024) menganalisis pengaruh indikator fundamental makroekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga terhadap investasi asing di lima negara ASEAN (ASEAN-5). Studi ini menggunakan data panel yang diperoleh dari Bank Dunia, mencakup data penanaman modal asing, PDB, inflasi, dan suku bunga selama periode 2007 hingga 2022. Model estimasi yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Hasil regresi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap FDI, dengan nilai probabilitas masing-masing di bawah 0,05. Pertumbuhan ekonomi ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi asing. Peningkatan GDP menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari naiknya pendapatan nasional. Kondisi ini mendorong peningkatan daya beli masyarakat dan permintaan pasar, yang pada akhirnya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.